



Salurkan Aspirasi Tidak Harus ke Pemkot

JOGJA -- Walikota Jogja, Drs H Haryadi Suyuti menyebutkan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja telah melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya kepada Camat dan Lurah. Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Balai kota Timoho.

"Hal ini dimaksud untuk mempercepat pembangunan di wilayah dan dalam rangka melaksanakan

program pembangunan berbasis wilayah," kata Haryadi saat menghadiri pelantikan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) se-kecamatan Mergangsan, Senin (25/3) malam, di Pendapa Kecamatan Mergangsan.

"Pak Camat sekarang sudah banyak mendapat pelimpahan pewenangan dari Pemerintah Kota Jogja.

Kewenangan yang ada sudah banyak yang disampaikan ke wilayah. Kami membuat Perwal Pelimpahan Kewenangan itu untuk percepatan pembangunan di masyarakat," lanjut Haryadi.

Walikota mengatakan, lembaga kelurahan dan kecamatan sebisa mungkin menjadi jembatan pertama

>> KE HAL 7

Salurkan Aspirasi

Sambungan dari halaman 1

aspirasi masyarakat. "Artinya, persoalan-persoalan di masyarakat, sebisa mungkin diberitahu dan dikoordinasikan dengan baik kepada camat. Jadi, tidak semua harus ke Timoho, tidak semua harus ke Pak Fadli (Asisten Bidang Pemerintahan) atau Walikota," tambahnya.

Langkah ini, ujarnya, sebagai implementasi dari Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 52 Tahun 2012. Perwal yang baru ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Walikota berharap para pengurus LPMK ikut membantu mendorong peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di wilayahnya dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, meningkatkan kualitas kerja sama dengan masyarakat melalui gotong royong dengan berlandaskan Segoro Amarto.

Jadi mitra

LPMK juga diharapkan menjadi mitra para Lurah, dan lembaga sosial kemasyarakatan lain yang ada di kelurahan untuk mensosialisasikan program dan kebijakan Pemkot.

Haryadi berharap LPMK juga dapat membentuk ketahanan masyarakat yang ada di wilayah. "Karena esensi dari sebuah LPMK adalah bagaimana menciptakan ketahanan warga masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat," terangnya.

Sementara itu Drs Ahmad Fadli, Asisten bidang Pemerintahan mengatakan posisi LPMK saat ini agak berbeda dengan posisinya di era sebelumnya. Secara implisit posisi LPMK seperti yang teruang di dalam Perwal adalah sebagai koordinator pembangunan partisipatif di tingkat kelurahan.

Selain itu juga pemilihan LPMK sekarang ini agak berbeda dengan sebelumnya. Pemilihan LPMK sekarang ini melibatkan organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di kelurahan seperti BKM, PKK, RT dan lainnya. "Kalau dulu cuma ketua RW. Sekarang tidak. Semua Lembaga Sosial Kemasyarakatan di level kelurahan bisa ikut. Dan ini kemudian keberadaan LPMK lebih legiti-masi karena mendapat dukungan dari semua lembaga di kelurahan," ujar Fadli.

(ros)

Instans	<input type="checkbox"/> Posur <input checked="" type="checkbox"/> Segera	Tindak Lanjut <input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi <input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
---------------------------	--	---



PELANTIKAN LPMK -- Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Mergangsan pada Senin (25/3) malam dilantik di hadapan Walikota Jogja Drs H Haryadi Suyuti. LPMK diharapkan mampu menjembatani aspirasi masyarakat. ISTIMEWA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kecamatan/Kemantren Mergangsan			

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005